

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto dalam Simson Ginting (2022 hlm. 13-14) pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Maksud sebagai proses yaitu pemberdayaan sebagai kegiatan untuk memberi daya atau kekuatan kepada individu dan kelompok dalam masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan maksud dari sebagai tujuan yaitu pemberdayaan mampu menunjukkan tingkat keberhasilan dari masyarakat yang diberdayakan dalam memenuhi kehidupannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan merupakan proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam berbagai bidang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Julian Rappaport (1984) dalam Hasya Mubarak, dkk. (2025 hlm. 154) pemberdayaan merupakan suatu metode yang mengarahkan individu, kelompok dan masyarakat agar dapat mengontrol dan memahami serta memiliki kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Menurut Sumardjo (2003) dalam Kiki Endah (2020 hlm. 137) pemberdayaan adalah proses berkembangnya kemauan dan kemampuan berinovasi masyarakat untuk tetap akses terhadap sumber daya sehingga masa depan individu ataupun komunitas sudah terjamin memiliki kualitas yang baik. Pemberdayaan tidak di fokuskan untuk masyarakat yang tidak berdaya saja, tetapi masyarakat yang memiliki daya juga berhak untuk melaksanakan pemberdayaan. Sedangkan menurut Widjaja (2011) dalam Kiki Endah (2020 hlm. 137) pemberdayan merupakan segala upaya dalam

meningkatkan kemampuan melalui motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal. Proses ini dilakukan melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan, serta mendorong motivasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat, baik yang belum maupun yang sudah memiliki daya.

Seperti sama halnya dengan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan Kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga dalam mengelola program ATENSI permakanan lansia di Kecamatan Indihiang. Dalam konteks ini, proses pemberdayaan terwujud melalui kegiatan pelatihan dan partisipasi aktif anggota Kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga, di mana mereka diberi kekuatan untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi lansia yang rentan terhadap kemiskinan dan malnutrisi di Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya. Misalnya, melalui penyuluhan nutrisi, distribusi makanan bergizi, dan monitoring kesehatan berbasis gotong royong.

Kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga agen perubahan yang membangun kapasitas internal masyarakat. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan ini diukur dari keberhasilan Kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, seperti penurunan risiko kekurangan gizi dan peningkatan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, seperti bahan makanan tradisional Sunda.

Dengan demikian, teori Edi Suharto memberikan kerangka analisis yang kuat untuk membahas pemberdayaan masyarakat melalui program ATENSI permakanan lansia, di mana proses dan tujuan pemberdayaan saling terkait untuk mencapai ketahanan komunitas jangka panjang, sebagaimana selaras dengan Rencana Strategis Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan RI (2023). Hal ini memperkuat bahwa pemberdayaan di Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abadi

Raga bukan sekadar intervensi sementara, melainkan transformasi berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan mendukung pembangunan inklusif di tingkat desa.

Lebih lanjut, pendekatan Edi Suharto ini dapat diintegrasikan dengan teori pemberdayaan komunitas Zimmerman (2000) dalam Sarjiyanto, et al. (2022 hlm. 209), yang menekankan dimensi organisasional di mana Kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan behavioral, seperti kemampuan kader dalam mengelola anggaran program gizi lansia. Integrasi ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis tidak hanya *output* langsung (seperti peningkatan asupan nutrisi harian lansia), tetapi juga dampak jangka panjang terhadap resiliensi sosial di Indihiang, di mana tantangan seperti akses terbatas ke layanan kesehatan pedesaan dapat diatasi melalui kolaborasi multi-stakeholder.

Selain itu, proses pemberdayaan di kelompok masyarakat (Pokmas) Abadi Raga dapat dieksplorasi lebih dalam melalui dialog reflektif antar-anggota, yang mendorong advokasi kebijakan lokal untuk alokasi dana desa yang lebih tepat sasaran bagi lansia miskin. Akhirnya, temuan penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi praktis, seperti pengembangan modul pelatihan berbasis digital untuk Kelompok masyarakat (Pokmas) serupa di Tasikmalaya, guna mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan sebagaimana digambarkan oleh Edi Suharto, sehingga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 2 (*Zero Hunger*) dan Nomor 3 (*Good Health and Well-Being*) di tingkat komunitas.

b. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pemberdayaan dijalankan, penting untuk mengetahui proses atau tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan tersebut. Menurut Edi Suharto dalam buku Hairudin La Patilaiya (2022 hlm. 10-12) menyatakan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan ada 7 (tujuh) tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan petugas dan persiapan di lapangan. Pada tahap ini perlu diperhatikan karena tahap persiapan ini merupakan awal mula pemberdayaan akan dilakukan.

2) Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian merupakan tahap mengidentifikasi masalah yang ditemukan dilapangan dan sumber daya kelompok masyarakat sebelum program pemberdayaan dilaksanakan.

3) Tahap Perencanaan Program

Tahap perencanaan program diperlukan agen perubahan dari petugas yang memiliki beberapa pemikiran alternatif untuk menentukan suatu program. Pada tahap perencanaan juga diperlukan rancangan dari suatu program yang akan dilaksanakan.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap pemformalisasi, agen perubahan membentuk kelompok guna merancang program yang dapat menyelesaikan masalah yang ada. Petugas kemudian menuangkan ide-ide tersebut dalam bentuk tertulis, terutama jika berkaitan dengan penyusunan proposal untuk pihak penyandang dana. Tahap ini melibatkan pengumpulan data pendukung seperti analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak yang dihasilkan dari program.

5) Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahapan pelaksanaan dari program apa yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, pelaksana program bertanggung jawab atas dalam mengkoordinasi kegiatan, memantau kemajuan program, serta menangani berbagai tantangan yang dilakukan selama proses pelaksanaan program.

6) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahapan penilaian dan pengawasan dari petugas pemberdayaan yang dilakukan disetiap akhir program yang

dijalankan. Tahap evaluasi penting dilakukan untuk perbaikan program yang keberlanjutan.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi terjadi ketika masyarakat yang diberdayakan sudah mandiri dan berubah menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Teori lain yang menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pemberdayaan, diperlukan untuk memperhatikan tahapan yang paling awal dalam melakukan pemberdayaan. Berikut menurut Sumodiningrat, dalam Safri Miradj (2021: 20), tahapan awal pemberdayaan yaitu diantaranya:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku

Pada tahap penyadaran ini lebih membuka kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan. Masyarakat diajak untuk mengenali permasalahan yang terjadi disekitar mereka secara objektif. Tujuan dari tahapan ini yaitu memberikan motivasi internal untuk masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan.

2) Tahap proses transformasi pengetahuan serta kecakapan keterampilan.

Pada tahap ini merupakan fase masyarakat diberikan informasi, pelatihan, serta pendampingan yang memiliki tujuan sebagai peningkatan pemahaman serta kemampuan masyarakat.

3) Tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian yang ditandai munculnya kreasi dan inovasi dari masyarakat.

c. Ciri-ciri Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memahami karakteristik dasar dari pemberdayaan masyarakat, penting untuk mengetahui ciri-ciri yang menjadi indikator keberhasilannya. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karangan Hairudin La Patilaiya (2022 hlm. 12-15) diantaranya sebagai berikut:

1) Tokoh atau Pemimpin Masyarakat (*Community Leaders*)

Pada tahap awal, para petugas tentunya akan melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu kepada para tokoh masyarakat. Para petugas

harus memanfaatkan keberadaan para tokoh masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat.

2) Organisasi Masyarakat (*Community Organization*)

Organisasi masyarakat merupakan mitra yang dimanfaatkan untuk melakukan kerja sama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi masyarakat program pemberdayaan dinilai lebih efektif karena pemahaman budaya lokal serta akses langsung kepada komunitas sasaran.

3) Pendanaan Masyarakat (*Community Fund*)

Pendanaan masyarakat adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang berasal dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, pendanaan masyarakat juga bisa berasal dari pemerintah setempat, namun pada konteks yang sebenarnya, pendanaan masyarakat ini tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.

4) Material Masyarakat (*Community Material*)

Pada material masyarakat ini, sumber daya alam menjadi potensi masyarakat. Material masyarakat juga merujuk pada sumber daya fisik atau aset lokal yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan pembangunan.

5) Pengetahuan Masyarakat (*Community Knowledge*)

Pengetahuan masyarakat bisa ditingkatkan melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Contoh penyuluhan atau sosialisasi tersebut yaitu penyuluhan yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat.

6) Teknologi masyarakat (*Community Technology*)

Teknologi masyarakat adalah kemampuan yang dimiliki, dikuasai dan dikembangkan oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat pemecah suatu masalah yang terjadi dalam suatu pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sumardjo (1999) dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karangan Hairudin La Patilaiya (2022 hlm. 8) juga mengemukakan bahwa ciri-ciri warga masyarakat yang sudah berdaya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mampu memahami diri dan potensi yang dimilikinya serta mampu merencanakan sesuatu yang dapat mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang.
- 2) Memiliki kemampuan bernegosiasi dalam melakukan kerja sama agar mendapatkan hasil yang saling menguntungkan.
- 3) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan tindakan yang telah dilakukannya.
- 4) Mampu mengondisikan, mengendalikan serta mengarahkan dirinya sendiri.
- 5) Memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berdiskusi.

d. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat, diperlukan landasan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam setiap langkah pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan nilai-nilai penting yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, Berikut prinsip-prinsip pemberdayaan dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karangan Hairudin La Patilaiya (2022 hlm. 15-16):

1) Prinsip Partisipasi Aktif

Pada prinsip partisipasi aktif ini masyarakat dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Pada prinsip partisipasi aktif ini, keterlibatan aktif masyarakat berpengaruh untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan dalam suatu program jangka panjang.

2) Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian merupakan prinsip yang mendorong masyarakat agar hidup mandiri, dapat memanajemen dan bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan serta tidak bergantung pada pihak

luar. Hal ini dianggap penting dalam prinsip pemberdayaan karena masyarakat dapat berkesempatan untuk mengembangkan potensi lokal. Maka dari itu, kemandirian dapat menciptakan inovasi dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik lagi.

3) Prinsip Kesenjangan

Prinsip kesetaraan ini menunjukkan bahwa semua sama baik dalam hak ataupun kewajiban sehingga tidak ada yang didominasi ataupun yang mendominasi. Hal ini setara dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang adil, dimana setiap individu berhak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan tanpa adanya diskriminasi ataupun perbedaan.

4) Prinsip Keberlanjutan

Pada prinsip keberlanjutan ini, program pemberdayaan perlu dirancang sebaik mungkin agar tetap terus berlanjut dan dikelola sendiri oleh masyarakat agar mereka bisa hidup sesuai dengan prinsip kemandirian. Keberlanjutan juga mencakup pengembangan sistem pendanaan mandiri, pelatihan dan pengembangan kapasitas, inovasi program, serta kaderisasi untuk memastikan masyarakat tetap mampu mengelola program tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Dengan demikian, masyarakat dapat terus mengelola dan mengembangkan program sesuai kebutuhan dan potensi lokalnya secara mandiri dan berkesinambungan.

2.1.2 Kelompok Masyarakat (Pokmas)

a. Definisi Kelompok Masyarakat

Menurut Wila Huki dalam penelitian Candra Kirana (2022: 30) definisi kelompok adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi serta saling menguntungkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kelompok terbentuk berdasarkan kepentingan bersama serta memiliki struktur tertentu yang mengatur hubungan antar anggotanya. Kelompok berfungsi sebagai wadah untuk bertukar pikiran,

saling mendukung dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Secara spesifik dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kelompok juga berperan penting dalam membangun solidaritas yang baik, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap suatu program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan pengertian kelompok dan pengertian masyarakat menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang hidupnya relatif mandiri dan tinggal bersama di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama serta memiliki kebudayaan yang sama, kemudian mereka bekerja sama dalam melaksanakan suatu program sehingga tujuan yang telah ditentukan tercapai dan saling menguntungkan satu sama lain. Kelompok masyarakat (Pokmas) didefinisikan sebagai kelompok sukarela berbasis komunitas yang dibentuk untuk mengelola program pembangunan sosial nasional yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemeran utama pengelola program tersebut.

b. Fungsi Kelompok Masyarakat

Dalam konteks pemberdayaan penelitian ini, kelompok masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan penerima manfaat (lansia) untuk mendapatkan hak dalam memenuhi kebutuhan gizi melalui program ATENSI Permakanan Lansia. Adapun fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang lainnya menurut penelitian M. Fikri (2022:7), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pokmas sebagai tempat untuk saling bertukar ilmu pengetahuan dengan sesama individu ataupun kelompok.
- 2) Sebagai pelaksana berbagai program kegiatan pemerintah, salah satunya pelaksana program ATENSI permakanan bagi para lansia.
- 3) Sebagai wadah untuk menuangkan ide dan aspirasi masyarakat.

2.1.3 Program ATENSI Permakanan Lansia

a. Definisi Program ATENSI Permakanan Lansia

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 18/4/HK.01/01/2024 memutuskan bahwa program permakanan lansia merupakan

sebuah kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) kali pengantaran. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan lansia tunggal di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi lansia. Program ini didirikan pada tahun 2022 sebagai bentuk perhatian lebih dari pemerintah untuk para lansia tunggal di seluruh Indonesia setelah pasca pandemi *covid-19*.

Program ATENSI Permakanan Lansia dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial RI dengan pemerintah daerah setempat, serta melibatkan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dan relawan sosial dari masyarakat lokal yang dibentuk untuk diberdayakan sebagai pelaksana program ATENSI Permakanan Lansia. Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan makanan bergizi bagi lansia yang masuk kategori rentan, terutama lansia keluarga tunggal, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka melalui intervensi gizi yang tepat.

b. Dasar Hukum Program ATENSI Permakanan Lansia

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Nomor: 18/4/HK.01/01/2024 program permakanan lansia dilaksanakan atas beberapa dasar hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
- 6) Keputusan Menteri Sosial Nomor 167/HUK/2023 tentang Penggunaan Bagan Akun Standar Dalam Penyaluran Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas serta Bantuan bagi Anak Yatim Piatu.

c. Konsep Program ATENSI Permakanan Lansia

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terdapat sasaran dalam program tersebut meliputi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas serta korban bencana dan kedaruratan. Selain tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tujuan program Asistensi sosial juga ditugaskan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu upaya perlindungan terhadap Lansia (Lanjut Usia) adalah seperti dilihat pada pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi (1) Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kesehatan sosial bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat.

Program Asistensi Rehabilitasi sosial terdapat dalam dua layanan yaitu layanan secara langsung yang dimana layanan tersebut menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau melalui kegiatan dukungan untuk menyediakan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan, dukungan dari keluarga, terapi fisik, terapi psikosial, terapi mental spiritual, layanan ATENSI secara langsung dilakukan masyarakat sebagai wujud perlindungan dan menyediakan hak bagi lanjut usia. Sedangkan layanan ATENSI secara tidak langsung merupakan layanan rehabilitasi sosial yang tidak dilakukan secara langsung di masyarakat, melainkan di pusat. Sementara itu, tujuan dari rehabilitasi sosial adalah memenuhi kebutuhan dasar minimal lansia terlantar, meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam menjamin hak-hak para

lansia terlantar, melaksanakan perlindungan sosial dan mobilisasi sosial terhadap lanjut usia terlantar.

Dalam rehabilitasi sosial diperlukan adanya peran pendamping yang bertugas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup lansia. Kualitas hidup pada lansia merupakan tingkat kebahagiaan dan kepuasan terhadap peristiwa atau kondisi yang dialami lansia, dipengaruhi oleh penyakit atau pengobatan. Kualitas hidup lansia dapat dicapai melalui kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi pelaksanaan program bagi lansia untuk mengurangi beban ketergantungan lanjut usia kerja, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lansia tetap sehat, mandiri dan aktif selama mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat mereka bekerja.

2.1.4 Lanjut Usia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lanjut usia adalah tahapan masa tua dalam perkembangan individu, yang umumnya dimulai dari usia 60 tahun ke atas, dan merupakan tahapan akhir dalam daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut Maramis (2009) yang dikutip dari jurnal penelitian (BL Fitriana 2011:11) mengatakan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah menginjak usia 65 tahun ke atas yang memiliki masalah dengan proses penuaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lanjut usia atau yang dikenal dengan singkatan lansia merupakan seseorang yang berumur diatas 65 tahun dan telah mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya seluruh fungsi tubuh, contohnya yang dulunya kekar ketika menginjak usia 65 tahun keatas akan menjadi lemah karena proses dari penuaan tersebut.

Penuaan tidak hanya dalam segi fisik seperti kekuatan otot, penglihatan ataupun pendengaran, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial lansia seperti menurunnya daya ingat dan perubahan suasana hati Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dan khusus bagi para lansia dari pihak keluarga, masyarakat ataupun dari pihak pemerintah.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ATENSI Permakanan Lansia” ini telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

Penelitian Ristanto, Supardal tahun 2024, dengan penelitiannya yang membahas tentang peran kelompok masyarakat (POKMAS) dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat berupa program kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan swakelola tipe IV yaitu pembangunan Nasional yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Cucun Lestiani, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung, dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) oleh Kementrian Sosial Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”. Penelitian ini membahas tentang implementasi program permakanan lansia di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung berjalan dengan baik karena program tersebut bekerja sama dengan sebuah kelompok masyarakat (POKMAS) yang membantu berjalannya program permakanan lansia mulai dari tahap persiapan sampai tahap implementasi.

Munfaati Laili, Mahasiswi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya, tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar di Kecamatan Pakal Kota Surabaya (Studi kasus Kelurahan Pakal)”. Penelitian ini membahas tentang data jumlah sasaran lansia yang menerima bantuan permakanan sesuai dengan WHO (*World Health Organization*).

Nasrun Pakaya dan Nirwanto, Mahasiswi Jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo tahun 2024 dengan penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan Kesehatan Lansia Melalui Program Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gizi Seimbang”. Penelitian ini

membahas tentang data hasil survey yang menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan dari pemahaman lansia mengenai pentingnya gizi seimbang.

Penelitian M. Ikbal Sonuari dan Ratih Dwi tahun 2025 yang berjudul “Pengorganisasian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Caringin Sinergi dalam Bantuan Kabupaten Bogor”. Penelitian ini membahas tentang implelementasi kegiatan pengorganisasian masyarakat di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Pokmas Caringin dibentuk atas dasar adanya fasilitas dari program bantuan permakanan lansia dari Kemensos.

Sedangkan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) “Abadi Raga” Oleh Kementerian Sosial RI Dalam Program Permakanan Lansia di Kecamatan Indihiang. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu bahwa dalam penelitian ini fokus untuk membahas tahapan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat (POKMAS) “Abadi Raga” dalam perannya menjalankan program permakanan lansia di Kecamatan Indihiang. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat kelompok masyarakat (POKMAS) “Abadi Raga”.

2.3 Kerangka Konseptual

Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam program permakanan lansia bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi para lansia dalam pemenuhan kebutuhan gizi serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola suatu program sehingga kehidupan masyarakat dapat berdaya dan sejahtera. Keterlibatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam program ATENSI Permakanan Lansia memperkuat nilai-nilai sosial kebersamaan, gotong royong dan rasa kepedulian antar sesama terhadap lanjut usia.

Dalam alur dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ATENSI Permakanan Lansia melalui tiga tahapan. Yang pertama adalah input, didalamnya terdapat subjek penelitian yaitu informan penelitian yang melakukan pemberdayaan dan yang diberdayakan diantaranya yaitu Pendamping Rehsos Kemensos RI, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan Kelompok Masyarakat Abadi Raga. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui program ATENSI

permakanan lansia ini, input merupakan unsur awal yang berperan menyediakan sumber daya, kebijakan serta dukungan agar terlaksananya kegiatan pemberdayaan. Input penelitian ini mencakup sumber daya manusia, lembaga kebijakan serta sarana dan prasarana yang terlibat dalam program tersebut.

Selanjutnya dari input tersebut lanjut ke tahap yang kedua adalah proses, dalam proses dijelaskan ada 7 (tujuh) tahapan pemberdayaan menurut teori Edi Suharto diantaranya tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap pemformalisasi, tahap implementasi, tahap evaluasi, tahap terminasi yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus pemberdayaan yang berkesinambungan. Pada tahap awal yaitu tahap persiapan baik dari kelompok masyarakat ataupun fasilitator yang terdiri dari kesiapan mental, sosial dan teknis. Yang kedua adalah tahap pengkajian berfokus dengan pengidentifikasian kondisi nyata pada kelompok masyarakat termasuk potensi serta kebutuhan yang ada melalui partisipatif. Tahap ketiga yaitu tahap perencanaan berfokus pada rancangan kegiatan pemberdayaan yang disusun bersama kelompok masyarakat menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, tujuan, dan strategi pelaksanaan program. Keempat adalah tahap pemformalisasi berfokus pada merencanakan pembentukan struktur kelompok masyarakat. Kelima adalah tahap implementasi yaitu tahap yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan atau melakukan aksi pemberdayaan melalui program ATENSI permakanan lansia. Keenam ada tahap evaluasi yang berfokus pada penilaian kinerja kelompok masyarakat, serta sejauh mana program ATENSI permakanan lansia ini telah dijalankan. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu tahap yang berfokus pada pengembangan hasil pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat.

Alur ketiga yaitu *output* yang hasilnya diketahui tahap pemberdayaan yang telah terlaksana pada Kelompok Masyarakat “Abadi Raga”. Untuk mengetahui *output* pada alur penelitian ini perlu diketahui terlebih dahulu seperti apa proses pemberdayaan terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abadi Raga. Melalui tahapan-tahapan tersebut dapat dianalisis proses pemberdayaan suatu Kelompok Masyarakat (Pokmas). Berikut disajikan kerangka konseptual dari penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

